

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Ekowisata

Salah satu jenis implementasi dari model pengembangan kepariwisataan berkelanjutan dan berawawasan lingkungan adalah pengembangan program ekowisata atau sering juga disebut sebagai *Nature Tourism* yang pada mulanya merupakan konsep perpaduan antara pendekatan konservasi lingkungan dan pengembangan kepariwisataan (Wheelan, 1991).

Dalam Deklarasi Quebec, menjelaskan bahwa ekowisata adalah suatu bentuk wisata yang mengadopsi prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan yang membedakannya dengan bentuk wisata lain (Damanik & Weber, 2006). Dalam praktiknya terlihat dalam bentuk wisata yang secara aktif menyumbang kegiatan konservasi alam dan budaya, melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan wisata serta memberikan sumbangsih positif terhadap kesejahteraan mereka, dan dilakukan dalam bentuk wisata independent atau diorganisasi dalam bentuk kelompok kecil (Heher, 2003).

Terdapat 3 (tiga) konsep dasar yang lebih operasional mengenai ekowisata (Damanik & Weber, 2006), yaitu:

1. Perjalanan *outdoor* dan di kawasan alam yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Pada wisata ini orang biasanya akan menggunakan sumberdaya hemat energi, seperti tenaga surya, bangunan kayu, bahan daur ulang, dan mata air. Sebaliknya, kegiatan tersebut tidak mengorbankan flora dan fauna, tidak mengubah topografi lahan dan lingkungan dengan mendirikan bangunan yang asing bagi lingkungan dan budaya masyarakat setempat;
2. Ekowisata mengutamakan penggunaan fasilitas transportasi yang diciptakan dan dikelola masyarakat kawasan wisata. Prinsipnya, akomodasi yang disediakan bukan berasal dari hotel dan makanan yang

ditawarkan juga bukan makanan berbahan baku impor, melainkan makanan berbasis produk lokal. Termasuk dalam penggunaan jasa pemandu wisata lokal. Oleh karena itu, ekowisata memberikan keuntungan langsung bagi masyarakat lokal;

3. Kegiatan dalam ekowisata berfokus pada lingkungan alam dan budaya lokal. Para wisatawan akan belajar melalui masyarakat lokal, bukan menggurui. Wisatawan tidak menuntuk masyarakat lokal untuk menciptakan pertunjukan dan hiburan ekstra, tetapi mendorong mereka agar diberi peluang untuk menyaksikan upacara dan pertunjukan yang sudah dimiliki oleh masyarakat setempat, sesuai kebudayaan setempat.

Tabel 2. 1 Kajian Ekowisata

Sumber Teori	Variabel	Hasil Kajian
(Damanik & Weber, 2006)	a. Lingkungan; b. Sosial; c. Edukasi.	a. Konservasi sumber daya alam; b. Melibatkan masyarakat lokal;
(Heher, 2003)	a. Lingkungan b. Sosial; c. Budaya; d. Ekonomi	c. Memberikan edukasi kepada pengunjung; d. Memberikan keuntungan langsung kepada masyarakat lokal; e. Memperkenalkan kebudayaan setempat.

*) Hasil Kajian Teori, 2021

2.1.1. Prinsip Ekowisata

Pada dasarnya, ekowisata memiliki prinsip-prinsip, meliputi menumbuhkan kesadaran lingkungan dan budaya, meminimalkan dampak, memberikan pengalaman positif baik kepada para turis maupun para penerima dan harus memberikan manfaat dan mampu memberdayakan masyarakat lokal atau sekitar (Tamelan & Harijono, 2019). Secara prinsip, ekowisata sangat mementingkan kealamian ODTW (objek destinasi tujuan wisata), etika konservasi, Pendidikan

dan keberlanjutan, sehingga disimpulkan bahwa prinsip ekowisata wajib memperhatikan konservasi sumber daya alam, menjamin keterlibatan masyarakat sekitar atau lokal, meningkatkan pengalaman, mencakup kegiatan yang bertanggung jawab, dan mendorong usaha kecil yang produktif (Asmin, 2017).

Prinsip-prinsip pengembangan ekowisata dalam suatu kawasan, harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut, (Yuliana, 2019):

1. Melakukan perencanaan kegiatan yang berkelanjutan pada industri pariwisata dengan melakukan penelitian terlebih dahulu, sehingga pengembangan wisata tidak melampaui daya dukung lingkungan dan sosial;
2. Melindungi keanekaragaman hayati dan lingkungan alami sekitarnya;
3. Berdampak pada lingkungan alami, baik pada pengerjaan konstruksi maupun saat dibuka sebagai wisata;
4. Mengelola limbah dan sampah secara cermat;
5. Mampu memenuhi kebutuhan energi, dengan menggunakan alat dan fasilitas yang tidak seluruhnya mengubah lingkungan alami;
6. Berkontribusi positif bagi kehidupan ekonomi masyarakat lokal secara berkelanjutan;
7. Mengakomodasi berbagai program penelitian guna berkontribusi dalam kegiatan ekowisata dan pengembangan berkelanjutan wilayah setempat, secara ekonomi, sosial, dan masyarakat;
8. Mengupayakan kerjasama dengan komunitas lokal dalam pembangunan dan pengelolaan ekowisata;
9. Mengalokasikan pendapatan yang didapat untuk kebutuhan konservasi alami wilayah;
10. Menawarkan program yang dapat memberikan pendidikan tentang lingkungan alami dan kebudayaan setempat, baik kepada tenaga kerja maupun wisatawan;

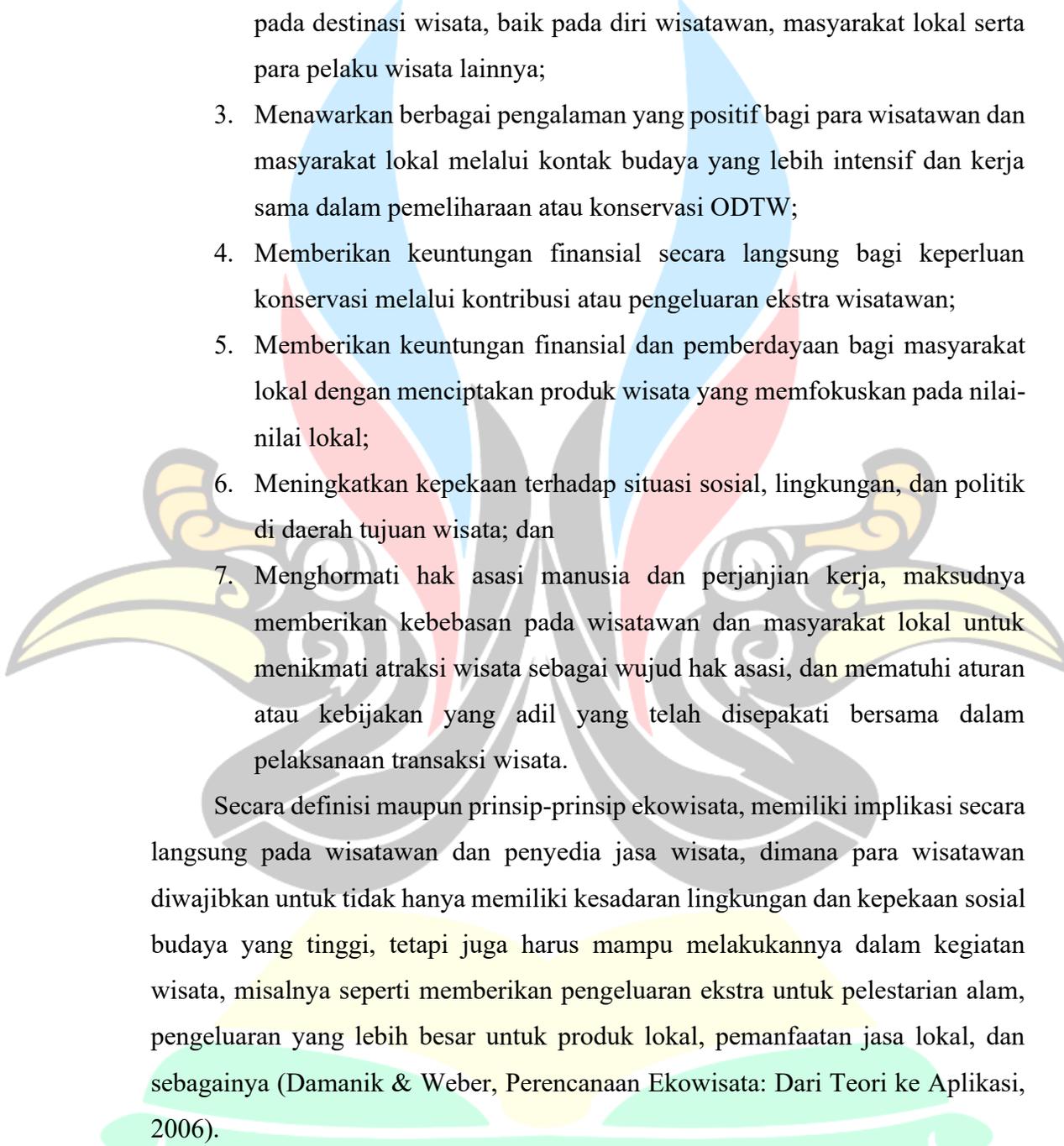
11. Menjadikan masukan dan aspirasi dari pengunjung sebagai pertimbangan dalam mengembangkan kegiatan pariwisata;
12. Kegiatan pemasaran dan promosi dilakukan secara akurat, sehingga dapat memenuhi harapan wisatawan secara nyata; dan
13. Mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap kehidupan sosial masyarakat lokal secara berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009, tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Daerah, prinsip-prinsip ekowisata, meliputi:

1. Kesesuaian antara jenis dan karakteristik ekowisata;
2. Konservasi, yaitu melindungi, mengawetkan, dan memanfaatkan secara lestari sumber daya alam yang digunakan untuk ekowisata;
3. Ekonomis, yaitu memberikan manfaat untuk masyarakat setempat dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya serta memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan;
4. Edukasi, yaitu mengandung unsur pendidikan untuk mengubah persepsi seseorang agar memiliki kepedulian, tanggung jawab, komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan budaya;
5. Memberikan kepuasan dan pengalaman kepada pengunjung;
6. Partisipasi masyarakat, yaitu peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata dengan menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan keagamaan di sekitar kawasan; dan
7. Menampung kearifan lokal.

Sedangkan, menurut (The International Ecotourism Society, 2000), prinsip-prinsip ekowisata, meliputi:

1. Mengurangi dampak negatif berupa kerusakan atau pencemaran lingkungan dan budaya lokal yang disebabkan oleh kegiatan wisata;

- 
2. Membangun kesadaran dan penghargaan atas lingkungan dan budaya pada destinasi wisata, baik pada diri wisatawan, masyarakat lokal serta para pelaku wisata lainnya;
 3. Menawarkan berbagai pengalaman yang positif bagi para wisatawan dan masyarakat lokal melalui kontak budaya yang lebih intensif dan kerja sama dalam pemeliharaan atau konservasi ODTW;
 4. Memberikan keuntungan finansial secara langsung bagi keperluan konservasi melalui kontribusi atau pengeluaran ekstra wisatawan;
 5. Memberikan keuntungan finansial dan pemberdayaan bagi masyarakat lokal dengan menciptakan produk wisata yang memfokuskan pada nilai-nilai lokal;
 6. Meningkatkan kepekaan terhadap situasi sosial, lingkungan, dan politik di daerah tujuan wisata; dan
 7. Menghormati hak asasi manusia dan perjanjian kerja, maksudnya memberikan kebebasan pada wisatawan dan masyarakat lokal untuk menikmati atraksi wisata sebagai wujud hak asasi, dan mematuhi aturan atau kebijakan yang adil yang telah disepakati bersama dalam pelaksanaan transaksi wisata.

Secara definisi maupun prinsip-prinsip ekowisata, memiliki implikasi secara langsung pada wisatawan dan penyedia jasa wisata, dimana para wisatawan diwajibkan untuk tidak hanya memiliki kesadaran lingkungan dan kepekaan sosial budaya yang tinggi, tetapi juga harus mampu melakukannya dalam kegiatan wisata, misalnya seperti memberikan pengeluaran ekstra untuk pelestarian alam, pengeluaran yang lebih besar untuk produk lokal, pemanfaatan jasa lokal, dan sebagainya (Damanik & Weber, Perencanaan Ekowisata: Dari Teori ke Aplikasi, 2006).

Menurut (Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, 2009), prinsip ekowisata terdiri dari, prinsip konservasi, prinsip partisipasi masyarakat, prinsip wisata dan prinsip edukasi, dan prinsip konservasi dan wisata.

Tabel 2. 2 Prinsip Ekowisata Menurut Direktorat Jenderal Pengembangan
Destinasi Wisata

No.	Prinsip	Kriteria
1	Prinsip konservasi dan partisipasi masyarakat	<p>Prinsip daya dukung lingkungan diperhatikan dengan tingkat kunjungan dan kegiatan wisatawan di sebuah daerah tujuan wisata dikelola sesuai dengan batas yang mampu diterima baik bagi dari aspek alam maupun sosial budaya.</p> <p>Dusahakan menggunakan teknologi ramah lingkungan (listrik tenaga surya, mikrohidro, biogas, dan sebagainya).</p> <p>Mendorong terbentuknya kawasan ekowisata sebagai kawasan dengan peruntukan khusus yang pengelolaannya diberikan kepada organisasi masyarakat yang kompeten.</p>
2	Prinsip partisipasi masyarakat (pengembangan institusi masyarakat lokal dan kemitraan)	<p>Membangun kemitraan antara masyarakat dengan para <i>tour operator</i> guna memasarkan dan mempromosikan produk ekowisata serta kerja sama antara lembaga masyarakat dan dinas pariwisata atau UPT.</p> <p>Pembagian yang adil dalam pendapatan dari pengelolaan hasil ekowisata pada masyarakat.</p> <p>Organisasi masyarakat harus membuat panduan bagi para turis, sehingga selama turis berada di daerah wisata, turis mengikuti etika yang tertulis padapanduan tersebut.</p> <p>Ekowisata berfokus pada perlunya usaha melindungi pengetahuan serta hak atas</p>

No.	Prinsip	Kriteria
		karya intelektual masyarakat lokal, termasuk foto, kesenian, pengetahuan tradisional, musik, dan sebagainya.
3	Prinsip partisipasi masyarakat (ekonomi berbasis masyarakat)	<p>Ekowisata mendorong adanya regulasi yang mengatur standar kelayakan <i>homestay</i> sesuai dengan kondisi lokasi wisata</p> <p>Ekowisata mendorong ketersediaan <i>homestay</i></p> <p>Ekowisata mendorong adanya prosedur sertifikasi pemandu wisata sesuai dengan kondisi lokasi wisata</p> <p>Ekowisata dan <i>tour operator</i> ikut mendorong peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta perilaku para pelaku ekowisata, khususnya masyarakat</p>
4	Prinsip edukasi	<p>Mengembangkan skema, dimana tamu secara sukarela terlibat dalam kegiatan konservasi dan pengelolaan kawasan ekowisata selama kunjungannya</p> <p>Kegiatan ekowisata mendorong masyarakat untuk mendukung dan mengembangkan upaya konservasi</p> <p>Kegiatan ekowisata harus selalu berjalan beriringan dengan kegiatan meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat mengenai pentingnya upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya</p> <p>Memasukkan kegiatan mengedukasi tentang budaya setempat dan konservasi</p>

No.	Prinsip	Kriteria
		bagi para wisatawan ke dalam paket ekowisata
5	Prinsip konservasi dan wisata (pengembangan dan penerapan rencana tapak dan kerangka kerja pengelolaan lokasi ekowisata)	Sarana dan prasarana pendukung yang dibangun tidak merusak ekosistem
		Rancangan fasilitas umum diharapkan sesuai dengan tradisi lokal dan masyarakat lokal terlibat dalam proses perencanaan dan pembangunannya
		Terdapat sistem pengolahan sampah di sekitar fasilitas umum
		Kegiatan ekowisata telah mengikuti arahan pemanfaatan ruang dan kualitas daya dukung lingkungan kawasan melalui pelaksanaan system zonasi dan pengaturan waktu kunjungan
		Mengembangkan paket wisata yang berfokus pada budaya, seni, dan tradisi lokal
		Kegiatan ekowisata mendukung program reboisasi guna menyeimbangi penggunaan kayu bakar untuk dapur dan rumah
		Memasukkan kegiatan pertanian maupun berburu masyarakat sekitar ke dalam atraksi lokal guna memperkenalkan wisatawan mengenai cara hidup masyarakat dan mengajak wisatawan menghargai pengetahuan dan kearifan lokal

*) Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, 2009

Dari pendapat para ahli mengenai prinsip ekowisata tersebut, maka dapat dilakukan komparasi, sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Kajian Prinsip Pengembangan Ekowisata

Sumber Teori	Indikator	Hasil Kajian
(Tamelan & Harijono, 2019)	a. Lingkungan; b. Sosial; c. Budaya.	a. Konservasi lingkungan; b. Melibatkan masyarakat;
(The International Ecotourism Society, 2000)	a. Lingkungan; b. Sosial; c. Budaya; d. Ekonomi; e. Edukasi.	c. Memberikan edukasi terhadap pengunjung dan masyarakat lokal;
(Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, 2009)	a. Lingkungan; b. Sosial; c. Ekonomi; d. Wisata; e. Kemitraan.	d. Memberikan keuntungan finansial secara langsung pada masyarakat;
(Yuliana, 2019)	a. Lingkungan; b. Sosial; c. Budaya; d. Ekonomi.	e. Mendorong usaha kecil pada masyarakat; f. Kerja sama multi sektor; g. Sarana dan prasarana wisata tidak merusak ekosistem.

*) Hasil Kajian Teori, 2021

2.1.2. Komponen Ekowisata

Menurut (Nastiti & Umilia, 2013), komponen ekowisata meliputi:

1. Daya tarik wisata. Daya tarik wisata merupakan suatu keunikan yang dimiliki objek wisata, sehingga dapat menarik minat wisatawan. Atraksi ekowisata memiliki kriteria utama, seperti keajaiban dan keindahan alam, keragaman flora dan fauna, dan kemudahan mengamati kehidupan satwa liar (Damanik & Weber, 2006). Sedangkan menurut UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, daya tarik wisata adalah suatu keunikan yang dimiliki oleh objek wisata seperti keindahan alam, keragaman flora dan fauna, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan;

2. Ketersediaan sarana dan prasarana wisata. Fasilitas baik penunjang maupun pendukung kegiatan wisata, yang meliputi akomodasi maupun aksesibilitas pada kawasan wisata. Aksesibilitas ekowisata, memiliki kriteria, seperti tidak terlalu jauh dari bandara atau pelabuhan laut dan durasi dan kenyamanan perjalanan cukup memadai, sedangkan akomodasi ekowisata, memiliki kriteria, seperti ketersediaan menu makanan yang praktis dan higienis dan ketersediaan pengembangan akomodasi yang memenuhi standar (Damanik & Weber, 2006);
3. Kualitas lingkungan. Berkaitan dengan kebersihan dan kenyamanan lingkungan pada kawasan wisata;
4. Perlindungan sumber daya, dan;
5. Pemasaran.

Sedangkan, menurut (Wood, 2002), komponen ekowisata terdiri dari 7 (tujuh) komponen, yaitu:

1. Kontribusi terhadap konservasi biodiversitas. Konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan biodiversitas tidak hanya penting bagi spesies dan habitat, menghindari kepunahan dan melestarikan warisan global, tetapi juga menawarkan keuntungan lain, seperti meningkatkan populasi satwa liar dan pendapatan yang berasal dari pariwisata, selain itu termasuk pada peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan ketahanan terhadap kekeringan masyarakat lokal (Marine Biodiversity of Raja Ampat Islands, 2013). Kontribusi terhadap konservasi biodiversitas juga tercantum dalam prinsip ekowisata, dimana ekowisata harus dapat menawarkan berbagai pengalaman yang positif bagi para wisatawan dan masyarakat lokal melalui kontak budaya yang lebih intensif dan kerja sama dalam pemeliharaan atau konservasi ODTW. Dalam ekowisata, kegiatan wisata tidak hanya bertujuan menikmati keindahan dan kekayaan alam itu sendiri, tetapi juga secara spesifik mengumpulkan dana yang akan digunakan bagi pelestarian

ODTW (Damanik & Weber, 2006). Kegiatan konservasi biodiversitas dapat berkontribusi terhadap hasil pembangunan, seperti membangun masyarakat lokal diberdayakan, diversifikasi mata pencaharian, mempromosikan kesetaraan gender, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, dan memberikan kontribusi untuk keamanan (Marine Biodiversity of Raja Ampat Islands, 2013). Selain itu, kegiatan promosi pemberian label lingkungan (*ecolabelling*) yang semakin gencar merupakan salah satu bentuk mendukung konservasi biodiversitas, seperti yang dilakukan di AS, dimana asosiasi Green Hotels Association menawarkan produk ramah lingkungan serta mengkampanyekan produk ramah lingkungan kepada pengunjung tamu hotel (Damanik & Weber, 2006);

2. Keberlanjutan kesejahteraan masyarakat lokal. Sesuai dengan prinsip ekowisata, yaitu prinsip partisipasi masyarakat, melalui pengembangan institusi masyarakat lokal dan kemitraan serta peningkatan ekonomi berbasis masyarakat. Hal-hal yang menjadi kunci dalam hal ini, meliputi: aspek organisasi dan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata menjadi kunci dalam ekowisata, pentingnya dukungan yang profesional dalam menguatkan lembaga atau organisasi lokal secara berkelanjutan, menciptakan kemitraan yang adil dan mendorong usaha mandiri serta seluruh kegiatan ekowisata yang secara langsung dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat lokal (Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, 2009). Dalam hal ini, seluruh perjalanan wisata menggunakan alat transportasi dan akomodasi lokal, begitupula pada moda angkutan dan fasilitas akomodasi dikelola langsung oleh masyarakat di daerah tujuan wisata, dengan mengedepankan aspek ramah lingkungan (Damanik & Weber, 2006). Kegiatan pengelolaan dapat berupa, pengembangan dan pengelolaan *homestay* bagi wisatawan, pemandu wisata yang merupakan orang lokal dengan pengetahuan dan pengalamannya mengenai lingkungan dan alam

setempat (Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, 2009);

3. Mencakup interpretasi/pengalaman pembelajaran. Hasil yang didapatkan dari kegiatan ekowisata tidak hanya digunakan untuk mendukung kegiatan konservasi lokal, namun juga mampu digunakan sebagai pengembangan masyarakat setempat secara berkelanjutan, dalam hal ini adalah pemberian program-program maupun pelatihan pendidikan lingkungan, selain itu penyedia wisata dituntut untuk mampu menyediakan produk-produk ramah lingkungan, misalnya dalam pengembangan atraksi wisata berlokasi dekat dengan alam, pengembangannya serasi dengan lingkungan, dan harus memberdayakan masyarakat lokal secara sosial, ekonomi, dan budaya (Damanik & Weber, 2006) serta penyedia wisata harus mampu menyediakan sarana informasi serta menciptakan kepedulian terhadap kerentanan (Wood, 2002);
4. Melibatkan tindakan bertanggung jawab dari wisatawan dan industri pariwisata. Kegiatan wisata berskala kecil, baik dalam arti jumlah wisatawan maupun usaha jasa yang dikelola, meskipun cara ini menyebabkan keuntungan yang diperoleh kecil, misalnya penyediaan akomodasi dengan kapasitas maksimum 20 kamar, walaupun kawasan wisata lainnya memungkinkan penyediaan kamar lebih dari itu (Damanik & Weber, 2006). Hal ini bertujuan agar menyeimbangkan kepuasan berwisata dengan daya dukung lingkungan (sosial-budaya dan alam) serta keuntungan yang dinikmati oleh masyarakat lokal (Chafe & Honey, 2004);
5. Berkembangnya usaha kecil. Terdapat 2 (dua) aspek yang menjadi acuan dalam berkembangnya usaha kecil sebagai usaha yang berhasil dalam kegiatan ekowisata, yaitu usaha harus layak secara ekonomi, menghasilkan pendapatan yang signifikan untuk masyarakat setempat, dan dikelola secara profesional dan usaha harus adil, bermanfaat bagi masyarakat lokal sebagai mitra utama dan mendukung konservasi secara

nyata, selain itu diperlukan strategi pencitraan (*branding*) dan promosi produk ekowisata, melalui kegiatan promosi dan pemasaran berskala internasional, melakukan survey pasar secara berkala guna mengetahui dinamika pasar, mengidentifikasi target pasar yang dikembangkan, menyelenggarakan promosi khusus (*family trip*, *media trip*, dan lainnya), serta membuka dan menjalin hubungan terbuka dengan pihak swasta, organisasi masyarakat, dan *tour operator* (Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, 2009);

6. Menggunakan sumber daya baru dan terbarukan. Kegiatan ekowisata diusahakan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, misalnya pasokan listrik dari tenaga surya, mikrohidro, dan biogas (Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, 2009);
7. Fokus pada partisipasi masyarakat, kepemilikan, dan kesempatan usaha. Berbagai pihak antar sektor industri harus saling berhubungan, melalui kerja sama lintas sektoral, baik sektor publik, sektor industri (*tour operator*, agen perjalanan, biro iklan, kelompok tani, jasa pemanduan, hotel dan akomodasi, restoran, café, rumah makan, *event organizer*), lembaga non pemerintahan/LSM, lembaga-lembaga penelitian, dan lembaga lembaga donor internasional (Damanik & Weber, 2006).

Program dan strategi kegiatan ekowisata yang disusun oleh para pengelola destinasi wisata dapat dinyatakan berhasil apabila pengelola dapat mengajak *tour operator* untuk peduli pada penyediaan biaya dan manfaat konservasi serta meningkatnya kepedulian akan partisipasi masyarakat (Asmin, 2017). Menurut (Piper & Yeo, 2011), guna menyamakan persepsi terhadap definisi, standar dan program sertifikasi ekowisata, maka dibutuhkan adanya proses politik, yaitu *ecolabelling dan ecocertification*, serta pentingnya kegiatan promosi dan pemasaran terutama di era digital saat ini. Selain itu, kegiatan promosi atau pemasaran ekowisata harus didasarkan pada kelompok, sumber daya, dan ekonomi, sehingga dapat meminimalisir adanya kesenjangan (Asmin, 2017).

Kemudian, menurut (Barus & dkk, 2013), komponen ekowisata, meliputi:

- a. Daya tarik objek wisata. Yaitu alasan yang menjadi keunikan bagi lokasi wisata, sehingga pengunjung ingin berkunjung ke lokasi wisata dan melakukan kegiatan wisata;
- b. Aksesibilitas. Kemudahan dalam kegiatan untuk mencapai lokasi objek wisata;
- c. Sarana dan prasarana. Merupakan fasilitas yang dapat memudahkan pengunjung dalam melakukan seluruh aktivitas pariwisata.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, maka dapat dilakukan komparasi sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Kajian Komponen Ekowisata

Sumber Teori	Indikator	Hasil Kajian
(Nastiti & Umilia, 2013)	a. Daya tarik; b. Lingkungan; c. Sarana dan prasarana; d. Promosi/pemasaran.	a. Daya tarik wisata; b. Konservasi sumber daya alam; c. Pemberdayaan masyarakat lokal;
(Wood, 2002)	a. Lingkungan; b. Kesejahteraan masyarakat; c. Edukasi; d. Ekonomi;	d. Kesejahteraan masyarakat lokal; e. Pemasaran/promosi; f. Sarana dan prasarana pariwisata;
(Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, 2009)	a. Lingkungan; b. Sosial; c. Promosi.	g. Kerja sama multi sektor.
(Barus & dkk, 2013)	a. Daya tarik; b. Aksesibilitas; c. Sarana dan prasarana.	

*) Hasil Kajian Teori, 2021

2.2. Pedoman Pengembangan Ekowisata

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, pemanfaatan ekowisata, terdiri atas:

- a. Pengelolaan kawasan ekowisata;
- b. Pemeliharaan kawasan ekowisata;

- c. Pengamanan kawasan ekowisata; dan
- d. Penggalian potensi kawasan ekowisata baru.

Selain pemanfaatan, peraturan menteri juga mengatur pengendalian ekowisata. Adapun pengendalian ekowisata diatur dalam bagian ketiga pasal 10, yaitu dengan dilakukannya:

- a. Fungsi kawasan;
- b. Pemanfaatan ruang;
- c. Pembangunan sarana dan prasarana;
- d. Kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis; dan
- e. Kelestarian kawasan ekowisata.

Pengendalian ekowisata sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10, meliputi:

- a. Pemberian izin pengembangan ekowisata;
- b. Pemantauan pengembangan ekowisata;
- c. Penertiban atas penyalahgunaan izin pengembangan ekowisata; dan
- d. Penanganan dan penyelesaian masalah atau konflik yang timbul dalam penyelenggaraan ekowisata.

Pada pasal 20 dan pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, menyatakan bahwa pengembangan ekowisata wajib memberdayakan masyarakat setempat, dan wajib terlibat pada perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata serta menyelenggarakan kegiatan peningkatan Pendidikan dan keterampilan masyarakat dengan melibatkan warga masyarakat, lembaga kemasyarakatan, Badan Permusyawaratan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan ekowisata, tercantum didalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata.

2.3. Konsep Pengembangan Wisata Hutan Mangrove Berbasis Ekowisata

(World Tourism Organization, 1999) menyatakan, bahwa ekowisata adalah bagian dari pariwisata alam, yang dimana diartikan sebagai termasuk didalamnya penggunaan konsumtif dan non konsumtif dari kehidupan alami dari bagian lingkungan alam. Konsep ekowisata pada masing-masing wilayah atau tempat berbeda-beda tergantung pada wilayah itu sendiri, termasuk pada ekowisata mangrove. Diperlukan *best practice* dalam menentukan konsep pengembangan ekowisata mangrove. Menurut (Olson, 2004), *best practice* merupakan sebuah metode yang telah dipertimbangkan sebagai sebuah metode unggul dibandingkan dengan metode lainnya. *Best practice* adalah suatu karya tulis yang bertujuan dalam menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga dapat diketahui penyelesaian yang dapat dilakukan (Habibah, Harmanto, Sarmini, Yani & Suwanda, 2020).

2.4. Hutan Mangrove

Mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang memiliki ciri khas, tumbuh dan berkembang di daerah pasang surut, khususnya di dekat muara, sungai, laguna, dan pantai yang terlindungi dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir (Prihadi, Riyantini, & Ismail, 2018). Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P35 Tahun 2010, menyatakan bahwa seluruh kesatuan antara mangrove, hewan, dan organisme lain yang saling berinteraksi terhadap sesama dengan lingkungannya, disebut sebagai ekosistem mangrove.

Menurut (Tjandra & Siagian, 2011), wilayah hutan mangrove tergenang air secara berkala dengan genangan air yang bervariasi, mulai terjadi setiap hari maupun daerah yang hanya terendam sekali dalam setahun. Kawasan mangrove mendapat pasokan air tawar yang cukup dari darat, oleh sebab itu ekosistem mangrove tumbuh subur di daerah muara. Daerah hutan mangrove biasanya terlindung dari ombak besar dan arus laut yang kuat dan tumbuh di daerah dengan kadar garam payau hingga asin. Tumbuhan di hutan mangrove memiliki toleransi yang tinggi terhadap kadar garam dengan salinitas sekitar 0-30 ppm.

Berdasarkan (Hamilton & Snedacker, 1984), pengelompokan hutan mangrove secara geomorfologi, meliputi:

1. Overwash mangrove forest. Tipe ini memiliki bentuk pulau yang terpisah. Jenis mangrove merah mendominasi kawasan ini. Tempat tumbuhnya adalah daerah yang sering dibanjiri dan terendam oleh air pasang. Akan tetapi, meskipun tipe kondisinya ekstrim, namun tipe ini memiliki produktivitas tinggi, dimana pohon-pohonnya mampu mencapai ketinggian hingga 7 meter;
2. Fringe mangrove forest. Tipe ini terbentuk sepanjang garis pantai atau pulau yang terlindungi dari gelombang dan arus. Wilayah tipe ini terkena pasang surut air laut secara periodik dan tipe ini memiliki struktur akar yang sudah terbangun dengan kokoh. Tipe hutan mangrove ini berfungsi sebagai pelindung garis pantai serta mampu tumbuh hingga ketinggian 10 meter;
3. Riverine mangrove forest. Tipe ini terbentuk di sepanjang sungai maupun aliran air dan setiap harinya terkena gelombang laut. Pada wilayah ini terjadi pertemuan antara arus air tawar dari daratan dengan air laut. Dengan adanya pertemuan ini, mengakibatkan tingkat sedimentasi di daerah ini tinggi. Ketinggian pohon mangrove pada tipe ini mencapai 18-20 meter. Tipe ini adalah tipe yang paling produktif karena tingginya konsentrasi zat-zat nutrisi untuk tumbuhan, hal ini disebabkan tingginya sedimentasi pada wilayah ini;
4. Basin mangrove forest. Tipe ini terbentuk di daerah yang lebih menjorok ke daratan. Ombak dan gelombang air laut membasahi daerah ini secara tidak teratur. Tipe ini adalah sumber penghasil kayu dengan tinggi maksimum pohonnya mencapai 15 meter;
5. Hammock forest. Tipe ini mirip dengan *basin mangrove forest*, tetapi terletak pada lokasi yang lebih tinggi. Kawasan ini sangat jarang dibasahi

oleh ombak atau gelombang air laut. Pohonnya sangat jarang tumbuh lebih dari 5 meter;

6. Scrub atau dwarf forest. Hutan mangrove dengan karakteristik seperti ini ditemukan pada kondisi lingkungan yang ekstrim. Wilayah ini jarang mendapat pasokan air laut dari gelombang. Tinggi pohon pada wilayah ini tidak lebih dari 1,5 meter. Pertumbuhan pohon yang terhambat disebabkan oleh factor nutrisi yang didapat terbatas.

2.4.1. Fungsi Hutan Mangrove

Ekosistem hutan mangrove merupakan salah satu sumber daya alam wilayah pesisir yang memiliki fungsi dan manfaat yang sangat besar, dimana fungsi hutan mangrove terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu fungsi fisik, fungsi biologis, dan fungsi ekonomi (Hairunnisa, Gai, & Soewarni, 2018).

1. Fungsi ekonomis mangrove terdiri atas:
 - a. Hasil kayu (kayu konstruksi, kayu bakar, kayu arang, serpihan kayu untuk bubuk kayu, tiang/pancang) (Yuliana, Pengembangan Objek Wisata Hutan Mangrove Berbasis Ekowisata di Kampung Sungai Rawa, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, 2019). Arang mangrove memiliki kualitas panas yang baik, sehingga hasil arang tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, namun diekspor ke China dan Taiwan (Tjandra & Siagian, 2011);
 - b. Hasil non kayu (berupa lahan ekowisata dan lahan budidaya) (Yuliana, Pengembangan Objek Wisata Hutan Mangrove Berbasis Ekowisata di Kampung Sungai Rawa, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, 2019).
2. Fungsi ekologi, terdiri atas fungsi perlindungan lingkungan ekosistem daratan dan lautan serta habitat berbagai jenis fauna, meliputi (Hairunnisa, Gai, & Soewarni, 2018):
 - a. Pelindung garis pantai;
 - b. Mencegah intrusi air laut;

- c. Sebagai tempat tinggal biota air laut atau air tawar;
 - d. Sebagai tempat mencari makan (*feeding ground*);
 - e. Sebagai tempat asuhan dan pembesaran (*nursery ground*);
 - f. Sebagai tempat pemijahan (*spawning ground*) bagi aneka biota perairan.
3. Fungsi fisik. Fungsi fisik mangrove adalah sebagai mitigasi bencana, seperti peredam gelombang dan angin badai bagi kawasan yang berada di sekitarnya atau di belakangnya, sebagai pelindung pantai dari abrasi, sebagai pelindung dari gelombang air pasang (rob), tsunami, penahan lumpur dan perangkap sedimen yang diangkut oleh air permukaan, pencegah intrusi air laut ke daratan dan sebagai penetralisir pencemaran perairan pada batas tertentu (Martuti, Setyowati, & Nugraha, 2019).

2.4.2. Jenis-jenis Mangrove

Jenis-jenis mangrove di Indonesia terdiri dari beberapa jenis menurut (Tjandra & Siagian, 2011), diantaranya:

1. Bakau (*Rhizophora spp.*). Bakau adalah nama sekelompok tumbuhan dari marga *Rhizophora*, suku Rhizophoraceae. Tumbuhan ini memiliki ciri-ciri mencolok berupa akar tunjang yang besar dan berkayu, pucuk yang tertutup daun penumpu yang meruncing, serta buah yang berkecambah dan berakar ketika masih berada di pohon. Pohon bakau adalah pohon yang besar dengan akar tunjang yang bercabang. Tinggi pohon dari akar hingga pucuk daun sekitar 4-30 meter. Panjang akar di atas lumpur mencapai 0,5-2 meter dengan diameter batang mencapai 50 cm. terdapat jenis bakau yang dijumpai di Indonesia, diantaranya bakau minyak, bakau kurap, dan bakau kecil;
2. Pedada (*Sonneratia spp.*). Tinggi pohon ini bisa mencapai 15 meter dengan buah dengan rasa masam dan berbentuk bola yang dapat

dimakan. Jenis pohon ini menumbuhkan akar napas yang muncul dan pekatnya lumpur untuk mengambil oksigen dan udara;

3. Api-api (*Avicennia spp.*). jenis ini juga menumbuhkan akar napas yang muncul dan pekatnya lumpur untuk mengambil oksigen dan udara. Pohon ini memiliki suku tersendiri, yaitu Avicenniaceae. Pohon ini mampu beradaptasi dengan lingkungan mangrove dengan akar nafasnya yang menyerupai paku yang Panjang dan rapat, muncul ke atas lumpur di sekeliling pangkal batangnya;
4. Kendeka (*Bruguiera spp.*). Pohon ini memiliki akar yang bertekung-tekuk seperti lutut manusia. Pohon ini memiliki banyak kegunaan, salah satunya sebagai kayu bakar dan dibeberapa daerah akar embrio nya diamankan dengan gula dan kelapa dan disebut sebagai manisan kendeka;
5. Nirih (*Xylocarpus spp.*). Pohon nirih memiliki akar udara yang disebut akar papan. Akar ini berbentuk pipih seperti papan yang tertancap ke permukaan tanah. Pohon ini juga memiliki banyak kegunaan, diantaranya kayu nya dapat digunakan sebagai bahan pembuatan perahu, kayu bakar.

2.4.3. Pelestarian Hutan Mangrove

Dalam usaha pelestarian hutan mangrove, terdapat 2 (dua) konsep utama yang dapat diterapkan, (Yuliana, Pengembangan Objek Wisata Hutan Mangrove Berbasis Ekowisata di Kampung Sungai Rawa, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, 2019), yaitu:

1. Perlindungan hutan mangrove.

Perlindungan hutan mangrove dilakukan guna menunjukkan bahwa kawasan mangrove diperuntukkan sebagai konservasi dan sebagai bentuk sabuk hijau disepanjang pantai dan sungai. Konservasi bertujuan sebagai perlindungan terhadap ekologis dan seluruh sistem penyangga kehidupan terutama sepanjang pesisir, pengawetan

keanekaragaman plasma nutfah, dan pelestarian serta pemanfaatan ekosistem (Ghufran, 2012).

2. Rehabilitasi hutan mangrove.

Rehabilitasi adalah suatu bentuk untuk mengembalikan kondisi ekosistem yang sehat secara ekologis, melalui kegiatan penghijauan yang dilakukan terhadap hutan-hutan mangrove yang hilang atau telah gundul. Rehabilitasi hutan mangrove dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya rehabilitasi metode empang parit dan rehabilitasi pola terpisah (Tjandra & Siagian, 2011).

Selain itu, bentuk pelestarian diatas, menurut (Ghufran, 2012), bentuk pelestarian ekosistem mangrove, meliputi:

1. Pengembangan ekowisata mangrove. Dengan mengembangkan mangrove sebagai ekowisata, maka akan menekan kerusakan ekosistem mangrove, sehingga pariwisata mangrove difokuskan pada pengembangan ekosistem pesisir dan laut;
2. Pengembangan akua-forestri. Pengembangan ini merupakan kombinasi pengelolaan yang mengabungkan antara 2 (dua) sumber daya alam secara terpadu, yaitu perikanan dan kehutanan dengan tanpa merusak ekosistem mangrove. Misalnya, budidaya kepiting menggunakan keramba pada bagian terbuka secara alami.

Perlindungan terhadap kawasan mangrove di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 24/PERMEN/KP/2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Bagian Ketiga Pasal 15.

Menurut (Tjandra & Siagian, 2011), terdapat pula cara untuk melakukan pelestarian hutan mangrove, diantaranya:

- a. Melakukan perubahan konsumsi pola bahan bakar. Cara ini dilakukan dengan melalui pengubahan pola konsumsi masyarakat lokal sekitar hutan bakau. Misalnya, mengganti penggunaan arang bakau dengan

arang leban dan tempurug kelapa serta menggunakan tungku yang lebih hemat, seperti anglo; dan

- b. Konvensi Ramsar. Konvensi Ramsar merupakan kesepakatan internasional tentang perlindungan wilayah lahan basah yang penting. Konvensi ini diadakan pada tanggal 2 Februari 1971. Lahan basah yang dimaksud terutama yang menjadi tempat tinggal burung air, termasuk di dalamnya adalah hutan mangrove. Konvensi ini bertujuan untuk mendata lahan basah yang penting dan mengawasi pemanfaatannya. Salah satu lahan di Indonesia yang terdaftar adalah Taman Nasional Wasur, Papua.

Berdasarkan pendapat ahli yang telah dijabarkan, maka dapat diambil kesimpulan terkait pelestarian mangrove, sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Kajian Pelestarian Mangrove

Sumber Teori	Indikator	Hasil Kajian
(Yuliana, 2019)	a. Konservasi mangrove; b. Rehabilitasi mangrove.	a. Konservasi mangrove; b. Rehabilitasi mangrove; c. Pengembangan ekowisata.
(Ghufran, 2012)	a. Pengembangan ekowisata; b. Pengembangan akua-forestri.	
(Tjandra & Siagian, 2011)	a. Perubahan konsumsi pola bahan bakar; b. Konvensi Ramsar.	

*) Hasil Kajian Teori, 2021

2.5. Pariwisata

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang melibatkan berbagai sektor dan lembaga, dimana bukan hanya berkaitan dengan aspek ekonomi saja, namun juga aspek lingkungan, politik, dan sosial budaya (Febriandhika & Kurniawan, 2020). Pariwisata merupakan suatu fenomena pergerakan manusia, barang, dan jasa yang sangat kompleks yang berkaitan erat dengan organisasi-organisasi, hubungan kelembagaan dan individu, kebutuhan layanan, penyediaan kebutuhan layanan, dan

sebagainya (Damanik & Weber, Perencanaan Ekowisata: Dari Teori ke Aplikasi, 2006).

2.5.1. Komponen Pariwisata

Menurut (Cooper, dkk, 1993), menyatakan bahwa komponen yang harus dimiliki sebuah objek wisata, meliputi 4 (empat) hal, yaitu atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan pelayanan tambahan.

1. Atraksi (*Attraction*). Adalah komponen dasar dalam daya tarik wisata. Atraksi diklasifikasikan berdasarkan jenis dan temanya, dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu daya tarik wisata budaya, daya tarik wisata alam, dan daya tarik wisata minat khusus (Sunaryo, Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, 2013). Atraksi alam meliputi pemandangan alam, kekayaan flora dan fauna, seperti danau, gunung, dan sebagainya. Lalu atraksi budaya meliputi peninggalan sejarah, seperti candi, adat istiadat masyarakat, seperti pasar terapung, dan atraksi buatan, seperti kebun raya dan taman safari (Damanik & Weber, 2006);
2. Fasilitas/Akomodasi (*Amenities*). Adalah berbagai jenis fasilitas dan kelengkapannya, baik sarana dan prasarana pariwisata yang dapat digunakan oleh wisatawan untuk beristirahat atau bersantai dengan nyaman serta menginap selama melakukan kunjungan pada suatu destinasi (Sunaryo, Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, 2013). Amenitas berhubungan dengan sarana akomodasi untuk menginap serta restaurant atau warung untuk makan dan minum serta kebutuhan lain yang mungkin diinginkan dan diperlukan oleh para wisatawan, seperti toilet umum, tempat parkir, toko cinderamata, dan sarana ibadah (Setyanto & Pangestuti, 2019). Adapun standar fasilitas pariwisata menurut Peraturan Menteri Pariwisata No 3 tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang

Pariwisata, standar fasilitas di lokasi pariwisata adalah sebagai berikut:

A. Tempat Makan

- i. Lokasi mudah diakses;
- ii. Sirkulasi udara dan pencahayaan baik;
- iii. Terdapat minimum 5 jenis makanan dan maksimum 20, dan tidak boleh ada duplikasi;
- iv. Terdapat tempat parkir;
- v. Terdapat sumber air bersih, drainase;
- vi. Terdapat area bongkar muat;
- vii. Terdapat fasilitas untuk penyandang disabilitas;
- viii. Kapasitas maksimal 300 orang, dan terdapat meja, kursi, dan tempat cuci makan.

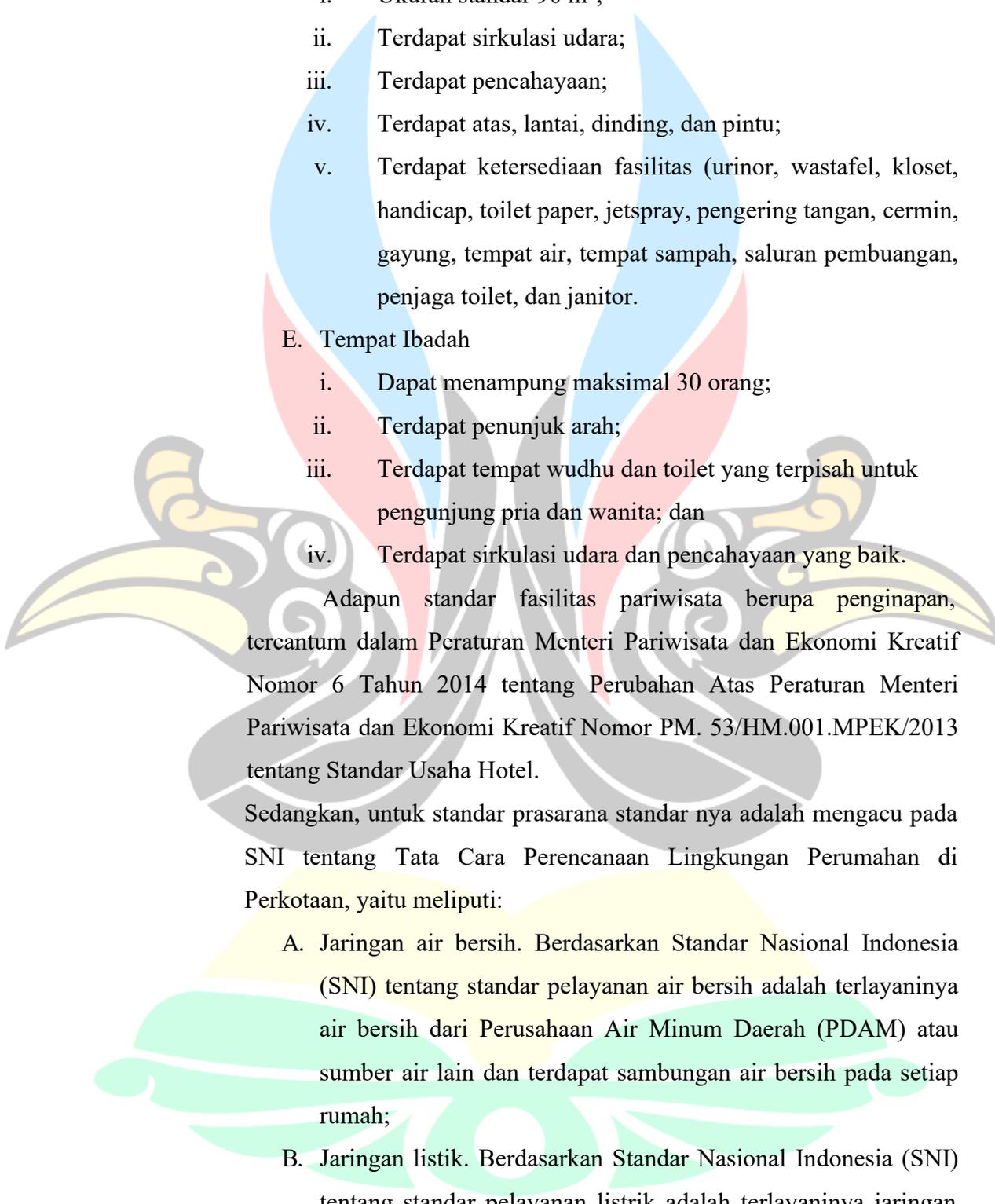
B. Tempat Belanja Cenderamata

- i. Luas ruangan disesuaikan dengan kebutuhan;
- ii. Terdapat sirkulasi udara yang baik;
- iii. Mudah diakses dan dekat dengan objek wisata;
- iv. Terdapat petunjuk arah dan nama kios cenderamata;
- v. Tidak ada penghalang pada pintu masuk;
- vi. Terdapat sarana dan prasarana penunjang, seperti toilet, tempat sampah, instalasi listrik, tempat parkir, instalasi kamera pengawas, dan akses khusus darurat.

C. Tempat Parkir

- i. Luas tempat parkir mobil dapat menampung 60% dari jumlah pengunjung;
- ii. Luas tempat parkir bus dapat menampung 40% dari jumlah pengunjung;
- iii. Luas tempat parkir untuk motor dapat menampung 25% dari jumlah pengunjung.

D. Toilet

- 
- i. Ukuran standar 90 m²;
 - ii. Terdapat sirkulasi udara;
 - iii. Terdapat pencahayaan;
 - iv. Terdapat atas, lantai, dinding, dan pintu;
 - v. Terdapat ketersediaan fasilitas (urinator, wastafel, kloset, handicap, toilet paper, jetspray, pengering tangan, cermin, gayung, tempat air, tempat sampah, saluran pembuangan, penjaga toilet, dan janitor).

E. Tempat Ibadah

- i. Dapat menampung maksimal 30 orang;
- ii. Terdapat penunjuk arah;
- iii. Terdapat tempat wudhu dan toilet yang terpisah untuk pengunjung pria dan wanita; dan
- iv. Terdapat sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik.

Adapun standar fasilitas pariwisata berupa penginapan, tercantum dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM. 53/HM.001.MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel.

Sedangkan, untuk standar prasarana standarnya adalah mengacu pada SNI tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, yaitu meliputi:

- A. Jaringan air bersih. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang standar pelayanan air bersih adalah terlayannya air bersih dari Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) atau sumber air lain dan terdapat sambungan air bersih pada setiap rumah;
- B. Jaringan listrik. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang standar pelayanan listrik adalah terlayannya jaringan

listrik pada setiap rumah dan terdapat tiang listrik serta gardu listrik;

C. Jaringan jalan. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan tahun 1998, standar jaringan jalan lokal minimum lebar 5 meter, dawasja 4 meter, dan terdiri dari damija, damaja, dawasja, bahu, dan trotoar serta saluran drainase dan median;

D. Jaringan telekomunikasi. Pengembangan sistem prasarana telekomunikasi harus ditingkatkan pengembangannya hingga mencapai pelosok wilayah yang belum terjangkau oleh sarana dan prasarana telekomunikasi dalam rangka mendorong kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yaitu dengan mengembangkan sistem seluler, sistem kabel, dan sistem satelit atau sistem internet, serta tersedianya tower BTS (*Base Transceiver Station*), dan pembangunan titik hot spot di area publik (Supriyanto, 2017).

3. Aksesibilitas (*Accessibility*). Adalah hal yang paling penting dalam kegiatan pariwisata. Aksesibilitas dalam pariwisata merupakan seluruh fasilitas dan moda angkutan yang memungkinkan dan memudahkan serta membuat nyaman wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata (Sunaryo, Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, 2013). Aksesibilitas merupakan satu komponen penting untuk mempermudah perpindahan seseorang dari satu tempat ke tempat lainnya, baik dalam jarak dekat, menengah, maupun jauh (Setyanto & Pangestuti, 2019). Aksesibilitas tidak hanya mengenai aspek kuantitas, melainkan inklusif mutu, ketepatan waktu, kenyamanan, dan keselamatan dan moda transportasi layak ditawarkan adalah angkutan penumpang yang berangkat ke dan tiba tepat waktu di ODTW (Damanik & Weber, 2006). Oleh sebab itu, pada ODTW

aksesibilitas harus meliputi: akses informasi, akses kondisi jalan menuju objek wisata, terminal, dan minimal nya terdapat pula tempat parkir, sehingga untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka perusahaan pariwisata harus memilih dan menerapkan solusi yang tepat dan memikirkan kepentingan turis, agar mampu menciptakan kenyamanan (Setyanto & Pangestuti, 2019);

4. Fasilitas Tambahan (*Ancillary*). Adalah pelayanan tambahan yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah atau pihak terkait dari suatu daerah tujuan wisata, baik ditujukan bagi wisatawan maupun pelaku pariwisata (Cooper, dkk, 1993). Fasilitas pendukung mencakup dengan adanya keberadaan organisasi atau lembaga yang memfasilitasi dan mendorong pengembangan serta pemasaran dari suatu destinasi wisata, misalnya tersedianya pemandu wisata, selain itu dapat pula merupakan fasilitas umum yang digunakan sebagai fasilitas wisata, seperti bank, sarana telekomunikasi, rumah sakit sebagainya, dimana keberadaan *ancillary* melengkapi amenities dan aksesilitas (Setyanto & Pangestuti, 2019).

2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai salah satu acuan dalam melakukan penelitian dan bertujuan agar memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan penelitian terdahulu, tidak ditemukan penelitian dengan judul yang serupa dan sama seperti judul penelitian ini. Akan tetapi, beberapa penelitian yang saling berkaitan dapat digunakan sebagai referensi dalam menambah bahan kajian penelitian. Berikut ini adalah sintesa penelitian terdahulu terkait pengembangan ekowisata di Indonesia.

Tabel 2. 6 Penelitian Terdahulu Terkait Pengembangan Ekowisata Mangrove

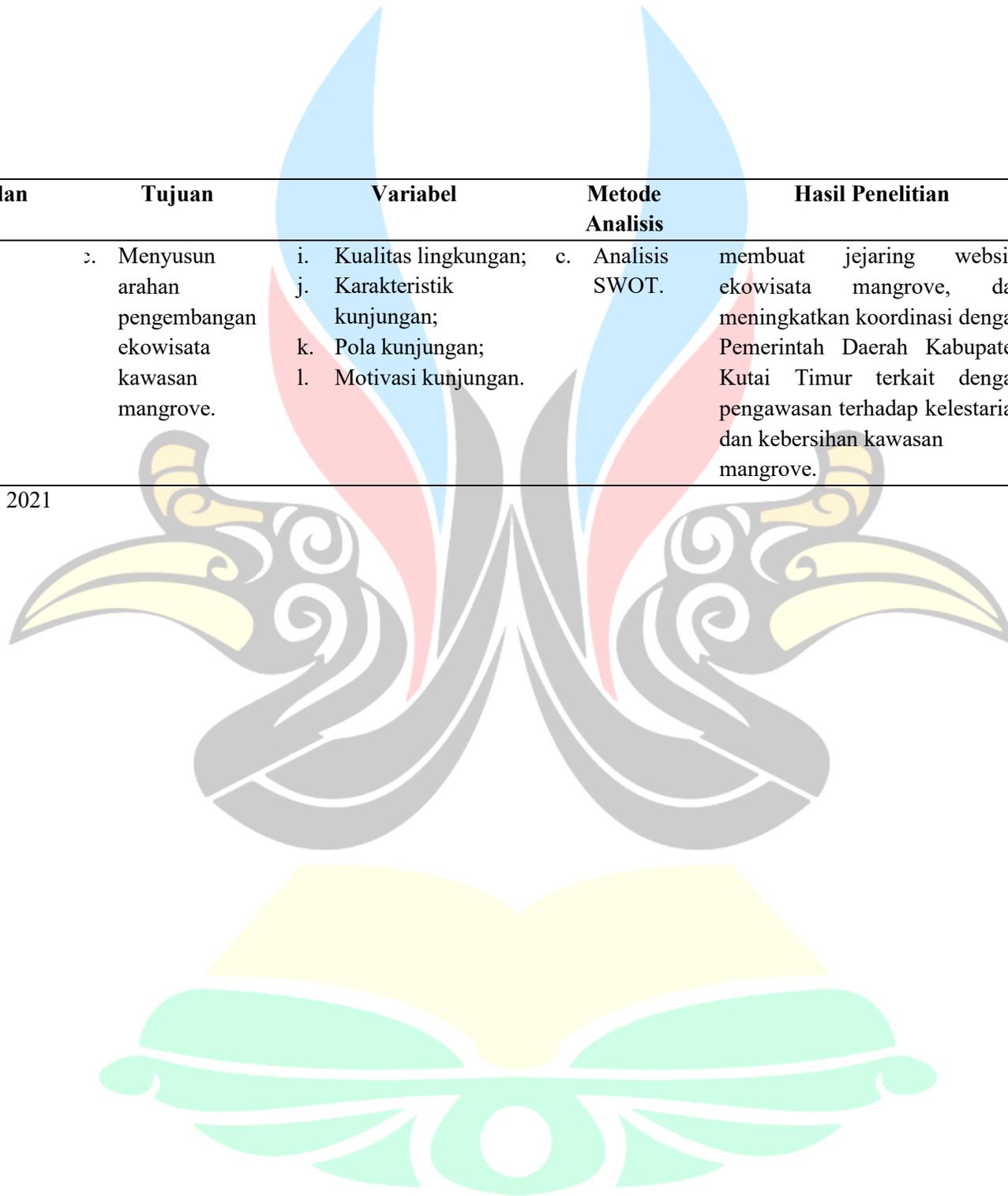
No.	Penulis dan Judul	Tujuan	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Adaptasi
1	Tatag Muttaqin, Ris Hadi Purwanto, Siti Nurul Rufiqo (2011). <i>Kajian Potensi dan Strategi Pengembangan Ekowisata di Cagar Alam Pulau Sempu Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur</i>	<p>a. Mengkaji kondisi kawasan Cagar Alam Pulau Sempu;</p> <p>b. Mengkaji potensi wisata kawasan Cagar Alam Pulau Sempu;</p> <p>c. Mengkaji strategi yang tepat untuk pengembangan kawasan Cagar Alam Pulau Sempu berdasarkan persepsi wisatawan dan <i>stakeholder</i>.</p>	<p>a. Atraksi;</p> <p>b. Aksesibilitas;</p> <p>c. Amenitas.</p>	<p>a. Analisis SWOT;</p> <p>b. Analisis AHP.</p>	<p>Arahan strategi pengembangan ekowisata di kawasan Cagar Alam Pulau Sempu, meliputi:</p> <p>a. Mengevaluasi Kembali fungsi dan status kawasan menjadi model kawasan yang dapat memberikan manfaat terhadap kawasan dan masyarakat;</p> <p>b. Membangun kesamaan persepsi dan konsep ekowisata antarstakeholder;</p> <p>c. Peningkatan sarana dan prasarana wisata Pendidikan;</p> <p>d. Meningkatkan peran masyarakat dan stakeholder lainnya dalam pengendalian kerusakan lingkungan;</p> <p>e. Pembentukan forum pengelolaan ekowisata;</p> <p>f. Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan ekowisata dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.</p>	<p>Sebagai panduan dalam menentukan variabel penelitian dan panduan dalam konsep pengembangan ekowisata</p>

No.	Penulis dan Judul	Tujuan	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Adaptasi
2	Saifullah dan Nuddin Harahap (2013). Strategi Pengembangan Wisata Mangrove di Blok Bedul Taman Nasional Alas Purwo Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur	<p>a. Mengidentifikasi dan menganalisis potensi wisata yang terdapat di Blok Bedul;</p> <p>b. Menganalisis persepsi masyarakat dan wisatawan terhadap ekowisata kawasan mangrove Blok Bedul;</p> <p>c. Menganalisis nilai kawasan ekosistem mangrove;</p> <p>d. Membuat arahan pengembangan ekowisata yang dapat diterapkan di Blok Bedul</p>	<p>e. Potensi biologi (flora dan fauna);</p> <p>f. Potensi fisik (aksesibilitas, infrastruktur, sarana dan prasarana);</p> <p>g. Budaya masyarakat setempat;</p> <p>h. Paket wisata yang ditawarkan;</p> <p>i. Data pengunjung (jumlah pengunjung, usia, asal, jumlah orang dalam satu rombongan, motivasi, uang yang sanggup dikeluarkan untuk melakukan wisata);</p> <p>j. Aktivitas masyarakat lokal yang berkaitan dengan wisata (pemanfaatan masyarakat lokal dalam kegiatan wisata);</p>	<p>a. Analisis mangrove;</p> <p>b. Analisis valuasi ekonomi;</p> <p>c. Analisis persepsi masyarakat;</p> <p>d. Analisis SWOT.</p>	<p>Potensi mangrove terdapat 4 spesies dari 2 famili, yaitu <i>Rhizophora mucronata</i>, <i>Rhizophora apiculata</i>, <i>Sonneratia alba</i> dan <i>Cariop tagal</i>. Selain itu, terdapat jenis burung air, burung darat, burung pemangsa, mamalia, reptile, pisces, dan crustacea. Potensi budaya terdapat upacara petik laut dan sumber air randu telu. Berdasarkan analisis persepsi masyarakat, sebanyak 47% dari jumlah pengunjung mengetahui tentang ekosistem mangrove, 47% dari keseluruhan responden yang memahami fungsi mangrove. Untuk pemberdayaan masyarakat, 50% responden menyetujui bahwa ekowisata harus memberikan nilai ekonomi pada masyarakat, sebanyak 67% responden memahami bahwa ekowisata harus disertai dengan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, untuk persepsi ekowisata, 73% masyarakat mengetahuinya. Untuk analisis</p>	<p>Sebagai panduan dalam menentukan variabel penelitian</p>

No.	Penulis dan Judul	Tujuan	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Adaptasi
			<ul style="list-style-type: none"> k. Fungsi dan tujuan TNAP; l. Stakeholder; dan m. Kebijakan. 		<p>valuasi ekonomi, total perhitungannya mencapai Rp. 88.606.183,00.- untuk nilai per 1000 orang dalam kunjungan per tahun. Untuk arahan strategi pengembangan ekowisata, terdiri dari 5 arahan, yaitu meningkatkan kelembagaan pengelolaan ekowisata, pengembangan usaha berbasis ekowisata dengan melakukan kerja sama multisektor, pengembangan wisata mangrove dengan mencari potensi wisata lain, membuat rencana kerja 5 tahun untuk pengembangan ekowisata berkelanjutan, dan menggunakan penelitian sebagai kajian.</p>	
3	Endang Karlina (2015). Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove di Kawasan Pantai Tanjung Bara, Kutai Timur, Kalimantan Timur	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengidentifikasi potensi penawaran ekowisata; b. Mengidentifikasi potensi permintaan ekowisata; dan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Daya tarik objek; b. Infrastruktur/fasilitas dan layanan; c. Potensi pasar; d. Keamanan; e. Sosial; f. Ekonomi; g. Institusi; h. Akomodasi; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Analisis potensi penawaran ekowisata (IFAS-EFAS); b. Analisis permintaan ekowisata; 	<p>Strategi yang dapat dikembangkan pada kawasan mangrove Sanggata, adalah: mengembangkan produk ekowisata minat khusus mangrove, meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana, meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang kompeten,</p>	<p>Sebagai panduan dalam menentukan variabel penelitian dan panduan dalam menyusun arahan</p>

No.	Penulis dan Judul	Tujuan	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Adaptasi
		<ul style="list-style-type: none"> g. Menyusun arahan pengembangan ekowisata kawasan mangrove. 	<ul style="list-style-type: none"> i. Kualitas lingkungan; j. Karakteristik kunjungan; k. Pola kunjungan; l. Motivasi kunjungan. 	<ul style="list-style-type: none"> c. Analisis SWOT. 	membuat jejaring website ekowisata mangrove, dan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur terkait dengan pengawasan terhadap kelestarian dan kebersihan kawasan mangrove.	pengembangan ekowisata

*) Olahan Penulis, 2021



Hasil penelitian Saifullah dan Nuddin Harahap (2013), yang berjudul Strategi Pengembangan Wisata Mangrove di Blok Bedul Taman Nasional Alas Purwo Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, membahas mengenai potensi wisata di mangrove Blok Bedul Alas Purwo lalu menganalisis persepsi masyarakat dan wisatawan terhadap ekowisata kawasan mangrove Blok Bedul dan nilai kawasan ekosistem mangrove dalam upaya pengembangan ekowisata mangrove dan arahan strategi pengembangan ekowisata yang dapat diterapkan di Blok Bedul. Hasil dari penelitian ini, yaitu didapatkan potensi mangrove, potensi budaya, dan persepsi masyarakat terhadap ekowisata dan pengetahuan masyarakat mengenai ekowisata serta didapatkan nilai valuasi ekonomi dan arahan strategi pengembangan ekowisata yang terdiri dari 5 strategi, yaitu meningkatkan kelembagaan pengelolaan ekowisata, pengembangan usaha berbasis ekowisata dengan melakukan kerja sama multisektor, pengembangan wisata mangrove dengan mencari potensi wisata lain, membuat rencana kerja 5 tahun untuk pengembangan ekowisata berkelanjutan, dan menggunakan penelitian sebagai kajian. Persamaan penelitian ini, yaitu memiliki tujuan yang sama dalam merumuskan arahan pengembangan ekowisata kawasan mangrove. Pada penelitian tersebut tujuan penelitian tidak hanya menentukan arahan strategi pengembangan ekowisata, tetapi juga mengidentifikasi potensi wisata dan valuasi ekonomi ekowisata, sedangkan penelitian ini memiliki tujuan akhir untuk merumuskan arahan pengembangan ekowisata.

Hasil penelitian Endang Karlina (2015) yang berjudul Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove di Kawasan Pantai Tanjung Bara, Kutai Timur, Kalimantan Timur, membahas mengenai faktor internal dan eksternal dalam pengembangan ekowisata dan merumuskan strategi pengembangan ekowisata Pantai Tanjung Bara secara berkelanjutan. Dalam penelitian ini didapatkan hasil 5 (lima) strategi pengembangan ekowisata Pantai Tanjung Bara. Persamaan penelitian tersebut adalah tujuannya, yaitu merumuskan arahan pengembangan ekowisata mangrove.

Sedangkan, perbedaannya pada penelitian tersebut, selain bertujuan untuk merumuskan arahan, juga untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal .

Hasil penelitian Tatag Muttaqin, Ris Hadi Purwanto, Siti Nurul Rufiqo (2011) yang berjudul Kajian Potensi dan Strategi Pengembangan Ekowisata di Cagar Alam Pulau Sempu Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur membahas mengenai kondisi , potensi dan strategi yang tepat untuk pengembangan ekowisata di Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu berdasarkan persepsi wisatawan dan stakeholder. Penelitian ini menghasilkan arahan strategi pengembangan ekowisata yang meliputi mengevaluasi kembali fungsi dan status kawasan menjadi model kawasan yang dapat memberikan manfaat terhadap kawasan dan masyarakat, membangun kesamaan persepsi dan konsep ekowisata antar stakeholder, peningkatan sarana dan prasarana wisata Pendidikan, meningkatkan peran masyarakat dan stakeholder lainnya dalam pengendalian kerusakan lingkungan, pembentukan forum pengelolaan ekowisata, pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan ekowisata dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini, adalah tujuannya dalam merumuskan arahan pengembangan ekowisata, sedangkan perbedaannya, meliputi jenis ekowisata yang dikembangkan dan lokasi penelitian yang berbeda.

2.7. Sintesa Tinjauan Pustaka

Adapun sintesa pustaka pada penelitian ini, meliputi:

Tabel 2. 7 Sintesa Variabel Penelitian

No.	Sasaran	Indikator	Variabel	Sumber
1	Menganalisis komponen pariwisata berbasis ekowisata guna mempersiapkan pengembangan ekowisata hutan mangrove mangrove Kampung Baru, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara	a. Daya tarik	Daya tarik wisata	Damanik & Weber, 2006; Cooper, dkk, 1993
		b. Lingkungan	Konservasi mangrove	Damanik & Weber, 2006; Wood, 2002
		c. Sosial/Partisipasi masyarakat	a. Partisipasi masyarakat	Damanik & Weber, 2006;
			b. Pemberdayaan masyarakat	Wood, 2002; Asmin, 2017;
			c. Kemitraan multisektor	Yuliana, 2019
		d. Ekonomi	Kesejahteraan masyarakat	Yuliana, 2019; The International Ecotourism, 2000; Damanik & Weber, 2006; Asmin, 2017
		e. Edukasi	a. Edukasi masyarakat local	Damanik & Weber, 2006;
b. Edukasi wisatawan	Wood, 2002; The International Ecotourism, 2000			
f. Promosi/pemasaran ekowisata	Promosi/pemasaran ekowisata	Yuliana, 2019; The International Ecotourism, 2000; Wood, 2002; Nastiti & Umila, 2013		
g. Sarana	a. Pusat informasi	Nastiti & Umila, 2013;		
	b. Tempat makan	Barus, dkk,		

No.	Sasaran	Indikator	Variabel	Sumber
			c. Tempat belanja cinderamata	2013; Cooper, dkk, 1993;
			d. Toilet	Permen
			e. Tempat parkir	Pariwisata
			f. Tempat ibadah	Nomor 3
			g. Penginapan	Tahun 2018 tentang
				Petunjuk DAK Fisik Bidang Pariwisata
		h. Prasarana	a. Jaringan air bersih	Nastiti & Umila, 2013;
			b. Jaringan listrik	Barus, dkk,
			c. Jaringan jalan	2013; Cooper,
			d. Sarana telekomunikasi	dkk, 1993; Permen
				Pariwisata
				Nomor 3
				Tahun 2018
				tentang
				Petunjuk DAK Fisik Bidang
				Pariwisata
2	Menganalisis komponen prioritas pariwisata berbasis ekowisata guna mempersiapkan pengembangan ekowisata hutan mangrove mangrove Kampung Baru, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara	a. Daya tarik	Daya tarik wisata	Damanik & Weber, 2006; Cooper, dkk, 1993
		b. Lingkungan	Konservasi lingkungan	Damanik & Weber, 2006; Wood, 2002
		c. Sosial/Partisipasi masyarakat	a. Partisipasi masyarakat	Damanik & Weber, 2006;
			b. Pemberdayaan masyarakat	Wood, 2002; Asmin, 2017;
			c. Kemitraan multisektor	Yuliana, 2019
		d. Ekonomi	Kesejahteraan masyarakat	Yuliana, 2019; The International Ecotourism, 2000; Damanik & Weber,

No.	Sasaran	Indikator	Variabel	Sumber
				2006; Asmin, 2017
	e. Edukasi		a. Edukasi masyarakat local b. Edukasi wisatawan	Damanik & Weber, 2006; Wood, 2002; The International Ecotourism, 2000
	f. Promosi/pemasaran	Promosi/pemasarran ekowisata		Yuliana, 2019; The International Ecotourism, 2000; Wood, 2002; Nastiti & Umila, 2013
	g. Sarana		a. Pusat informasi b. Tempat makan c. Tempat belanja cinderamata d. Toilet e. Tempat parkir f. Tempat ibadah g. Penginapan	Nastiti & Umila, 2013; Barus, dkk, 2013; Cooper, dkk, 1993; Permen Pariwisata Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk DAK Fisik Bidang Pariwisata
	h. Prasarana		a. Jaringan air bersih b. Jaringan listrik c. Jaringan jalan d. Sarana telekomunikasi	Nastiti & Umila, 2013; Barus, dkk, 2013; Cooper, dkk, 1993; Permen Pariwisata Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk DAK Fisik Bidang Pariwisata

No.	Sasaran	Indikator	Variabel	Sumber
3	Menyusun arahan pengembangan ekowisata hutan mangrove Kampung Baru, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Penajam, Kabupaten	Hasil dari analisis sasaran 1 dan 2		
		Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Penajam Paser Utara	a. Konservasi lingkungan b. Sarana dan prasarana c. Kemitraan multisektor d. Promosi	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Penajam Paser Utara
		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah	a. Pemanfaatan b. Pemberdayaan masyarakat	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah
		<i>Best Practice Pengembangan Ekowisata Mangrove</i>	a. Konservasi lingkungan b. Kemitraan multisektor c. Partisipasi masyarakat d. Kesejahteraan masyarakat local e. Edukasi masyarakat local f. Edukasi wisatawan	<i>Best Practice Pengembangan Ekowisata Mangrove</i>

*) Hasil Kajian Teori, 2021